



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM LHK

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM LHK
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Daftar Isi

Daftar Isi	iv
Kata Pengantar	vii
Ringkasan Eksekutif	1



1

Pendahuluan

Latar Belakang	4
Struktur Organisasi	5
Sumber Daya Manusia	7
Struktur SDM	9

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis 2020-2024	13
Rencana Kerja 2023	15
Perjanjian Kinerja 2023	16

2

Akuntabilitas Kinerja

Reviu atas Dokumen Perencanaan 2023	19
Reviu Hasil Evaluasi SAKIP	20
Metode Pengukuran	21
Hasil Pengukuran Kinerja	22
Benchmarking Nilai SAKIP	25
IKK 1. Nilai SAKIP Badan P2SDM	26
IKK 2. Level Maturitas SPIP	32
IKK 3. Laporan Keuangan yang tertib dan akuntabel	36
Realisasi Anggaran Tahun 2023	42

3

4 Penutup

44

Dokumen ini dapat diunduh di sini :



<https://bit.ly/LKJ2023SetBP2SDM>





Dr. Tuti Herawati, S.Hut., M.Si
Plt. Sekretaris Badan P2SDM

Kata Pengantar

Plt. Sekretaris Badan P2SDM

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan P2SDM ini disusun untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor P.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban Sekretariat Badan P2SDM terhadap stakeholders atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2020-2024. Tahun 2023 merupakan capaian tahun ke empat dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.

Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh Sekretariat Badan P2SDM dalam mendukung kinerja organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM selama tahun 2023.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Badan P2SDM dalam memperbaiki kinerjanya, serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam menyusun program di masa mendatang, sehingga lebih efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Jakarta, 12 Januari 2024

Sekretaris Badan P2SDM



Tuti Herawati
Tuti Herawati, S.Hut., M.Si
NIP. 197312151998032003

Ringkasan Eksekutif

Capaian Sekretariat Badan P2SDM



IKK 1

Nilai SAKIP Badan P2SDM

Target : 78 poin

Realisasi : 76,21 poin **(97,70%)**



IKK 2

Level Maturtitas SPIP

Target : Level 3

Realisasi : Level 3 **(100%)**



IKK 3

Laporan Keuangan Badan P2SDM yang tertib dan akuntabel

Target : 1 dokumen

Realisasi : 1 dokumen **(100%)**

99,24%

Nilai Kinerja Sekretariat Badan P2SDM

97,64%

Realisasi Anggaran untuk memenuhi sasaran yang dipertajakan.

0,96

Efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Badan P2SDM. Sebagai catatan, angka efisiensi kurang dari angka 1 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efektif untuk memenuhi sasaran.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023 menyajikan keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah dipertajakan dalam Perjanjian Kinerja oleh Sekretaris Badan P2SDM kepada Kepala Badan P2SDM selama Tahun 2023 serta hal yang perlu diperbaiki.

Dalam pencapaian maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran tersebut. Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan P2SDM Tahun 2022, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dipertajakan yaitu:

1. Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dengan capaian 76,21 poin atau 97,70 persen dari target 78 poin.
2. Level Maturitas SPIP dengan capaian Level 3 atau 100,00 persen dari target Level 3
3. Laporan Keuangan Badan P2SDM yang tertib dan akuntabel dengan capaian 1 dokumen atau 100% dari target 1 dokumen.

Hasil pengukuran dari indikator kinerja kegiatan menunjukkan bahwa Nilai Kinerja Sekretariat Badan P2SDM pada Tahun 2023 sebesar 99,24 persen dengan capaian pelaksanaan anggaran sebesar Rp25.434.064.000 atau sebesar 97,64 persen dari pagu anggaran sebesar Rp25.434.064.000. Adapun rasio efektivitas capaian kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023 yaitu 0,91 dan rasio efisiensi capaian kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2022 mempunyai nilai yang sama yaitu sebesar 1. Hal menunjukkan bahwa Sekretariat Badan P2SDM telah efektif dan efisien dalam menggunakan sumberdaya manusia dan anggaran untuk mencapai kinerja.

Meskipun demikian, Sekretariat Badan P2SDM berkomitmen terus menerus menyempurnakan dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.

1

PENDAHULUAN



Latar Belakang

Laporan Kinerja Sekretariat Badan P2SDM merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Badan P2SDM atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini juga merupakan ikhtisar kinerja yang meliputi nilai kinerja, realisasi anggaran, dan efisiensi kinerja. Nilai kinerja tersebut didapatkan pada rerata dari masing-masing capaian Indeks Kinerja Kegiatan (IKK) dalam bentuk persentase. Efisiensi diperoleh berdasarkan hasil nilai kinerja dibagi dengan persentase realisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Badan P2SDM ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2023 ini dibuat dengan menyajikan serangkaian keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian rencana, tindakan dan kegiatan atas perencanaan dan perjanjian kinerja Sekretariat Badan P2SDM dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui program Reformasi Birokrasi. Laporan kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023 ini juga menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Tahun 2023. Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Perencanaan untuk meningkatkan kinerjanya.

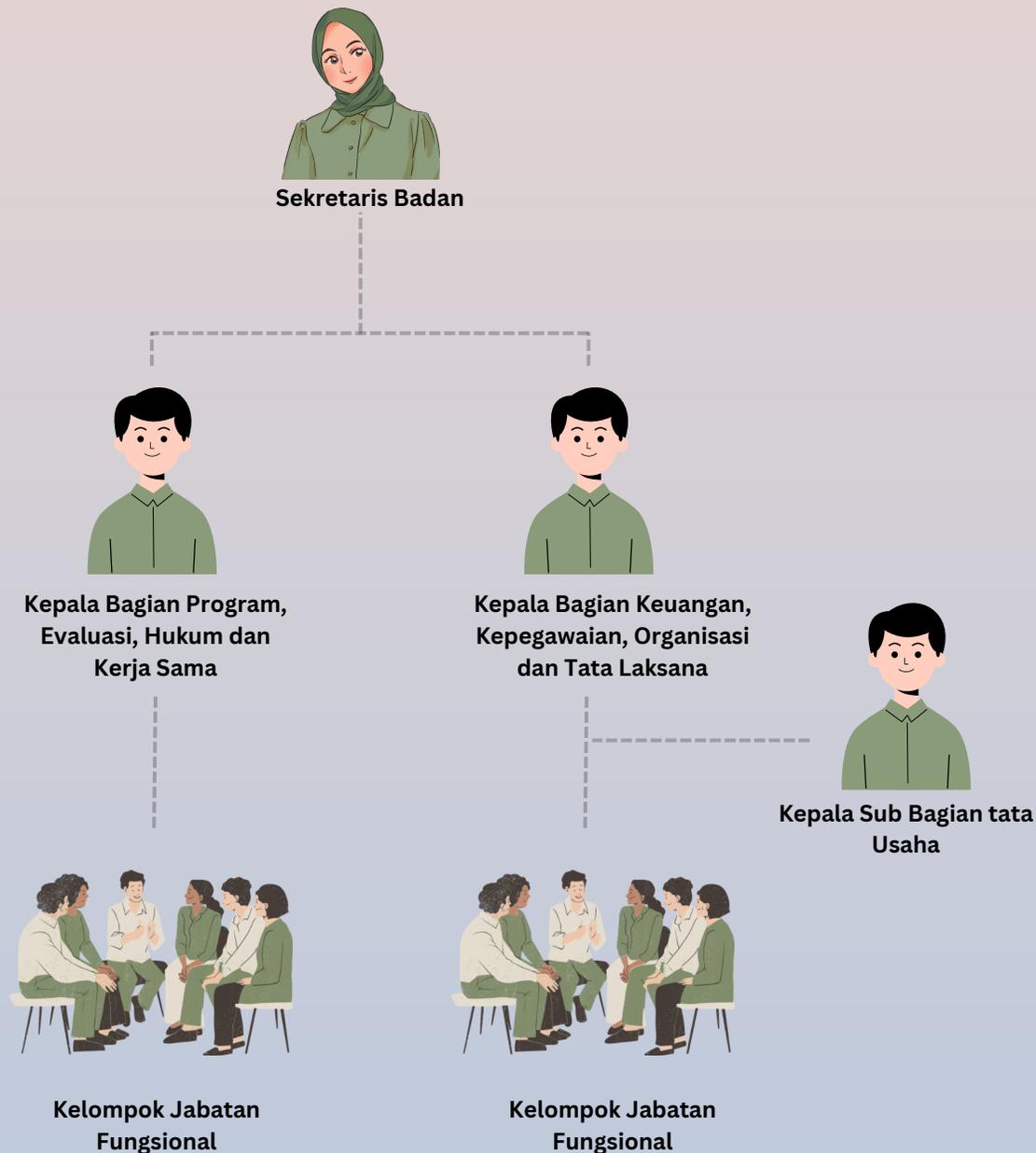
Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Badan P2SDM menjadi garda terdepan dalam berinteraksi dengan para pihak baik internal Badan P2SDM maupun dengan Eselon I lingkup Kementerian LHK maupun Kementerian/Lembaga lain serta masyarakat khususnya dalam hal penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik. Membumikan tugas dan fungsinya dalam kerja sehari-hari secara terukur dan sistematis menjadi modal penting dan tujuan setiap unit kerja lingkup Sekretariat Badan P2SDM sebagai upaya untuk peningkatan kinerja organisasi.

Sekretariat Badan P2SDM memiliki tugas dan fungsi yaitu : (1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama, pemantauan, evaluasi, konsultasi publik dan pelaporan kinerja; (2) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi, serta hubungan masyarakat; (3) Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik; (4) Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, administrasi kerja sama, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum; dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga keuangan dan perlengkapan di lingkup Badan.

Laporan kinerja merupakan ikhtisar penjelasan ringkas tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja dan memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati, maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023.

Struktur Organisasi

Pada tanggal 1 Juli 2021, Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar telah menyetujui Peraturan Menteri No. 15 tahun 2021 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang dibentuk sebagai upaya pencapaian dari fokus kerja pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Sekretariat Badan P2SDM sesuai dengan SOTK terbaru mengalami transformasi jumlah bagian serta peralihan penjabat Eselon IV menjadi pemegang jabatan fungsional.



Sekretariat Badan P2SDM menyelenggarakan fungsi:

- 1.koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama, pemantauan, evaluasi, konsultasi publik dan pelaporan kinerja;
- 2.koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, serta hubungan masyarakat;
- 3.koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik;
- 4.koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, administrasi kerja sama, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- 5.pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, keuangan dan perlengkapan di lingkungan badan.

Dalam menjalankan tugasnya Skretariat Badan P2SDM terdiri dari Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik dan Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum

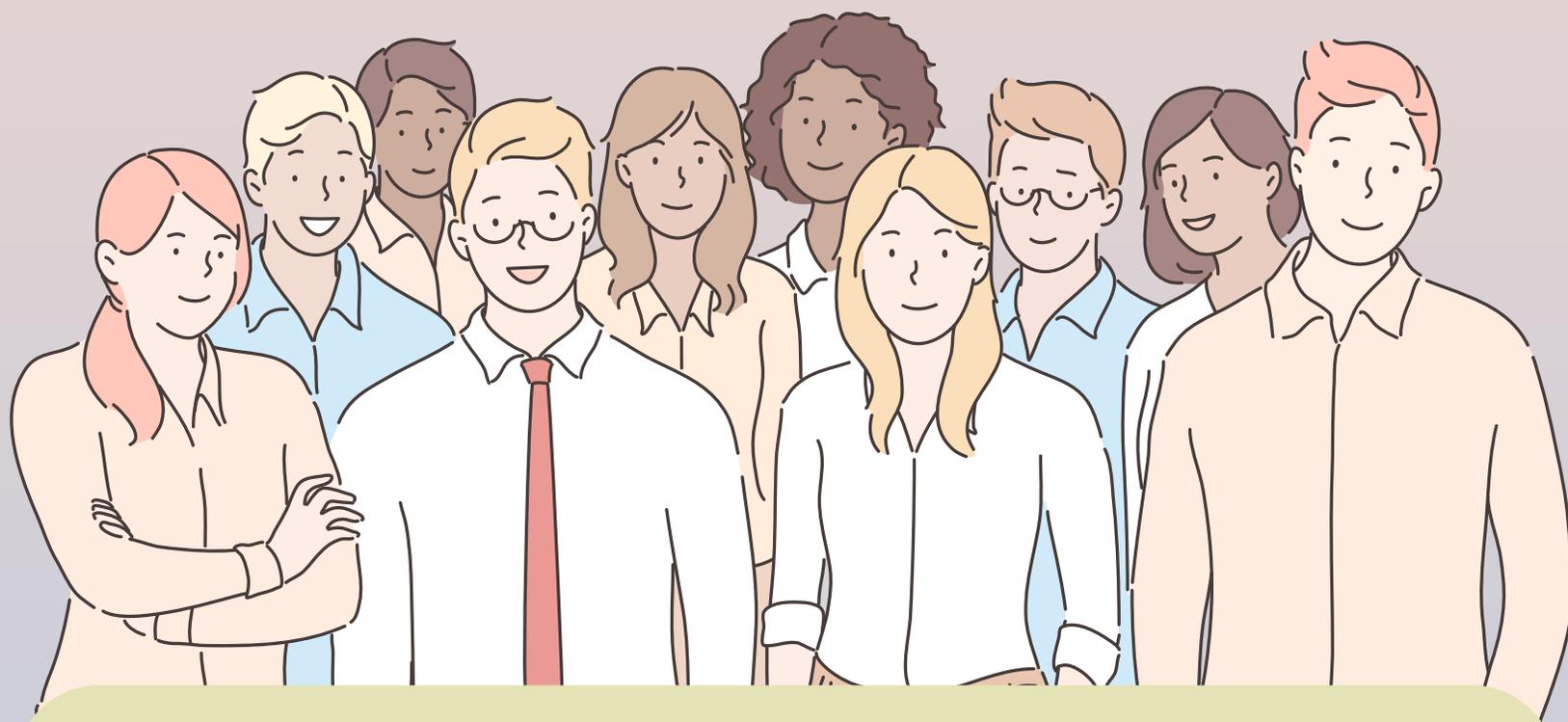
2. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

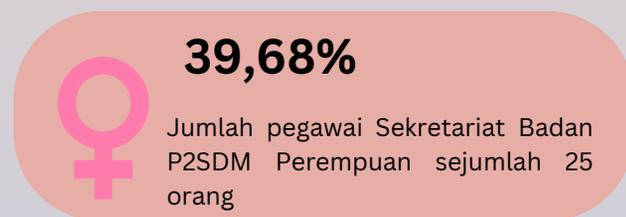
Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari Sub bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Badan

Sumber Daya Manusia

Sekretariat Badan P2SDM

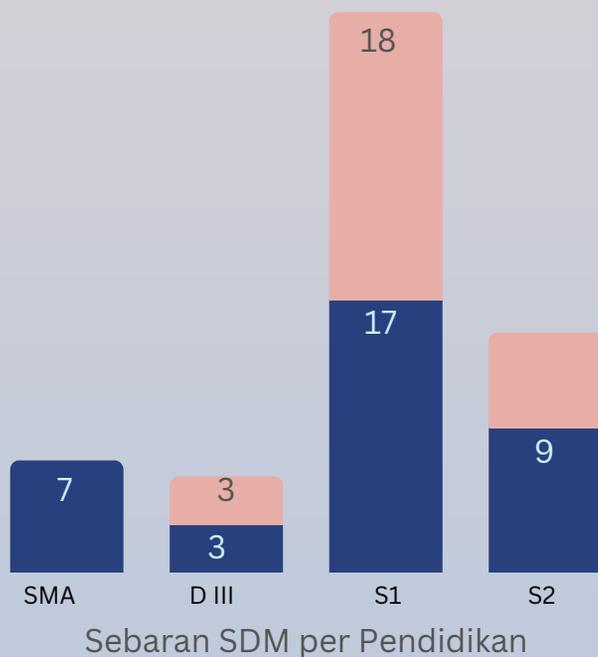
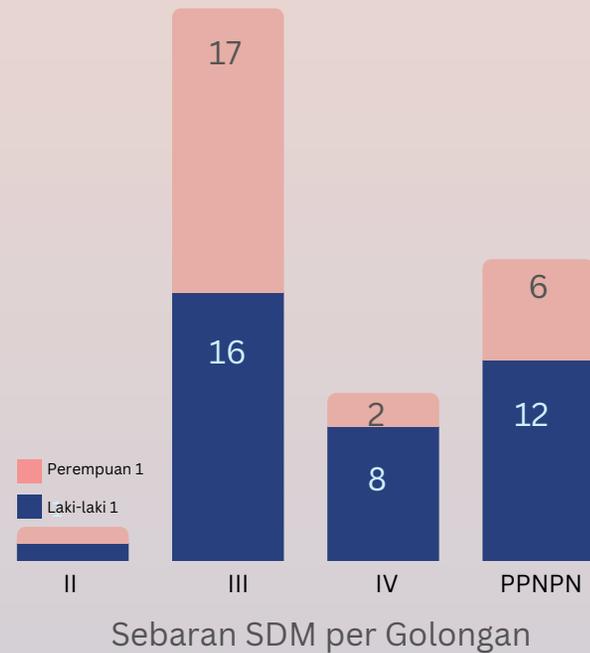


Sekretariat Badan P2SDM memiliki pegawai sebanyak **63 Sumber Daya Manusia** yang kompeten dan profesional. SDM tersebut terdiri dari 47 ASN dan 16 PPNPN yang menjadi 2 bagian. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama sebanyak 27 orang dan Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebanyak 34 orang. Selain itu terdapat 2 orang pegawai yang penugasan di BRGM. Pada Tahun 2023 ini terdapat 3 orang pensiun dan 3 orang mutasi ke intansi luar KLHK.



Angka di atas menunjukkan hasil prosentase klasifikasi pegawai Sekretariat Badan P2SDM berdasarkan jenis kelamin. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 38 orang atau 60,32 persen sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 25 orang atau 39,68 persen. Jumlah pegawai Laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan.

Struktur Sumber Daya Manusia



Perempuan
Laki-laki

Jumlah pegawai Sekretariat Badan P2SDM berdasarkan bagian paling banyak berada di Bagian Kepegawaian, Keuangan, Organisasi dan Tata Laksana dengan jenis kelamin laki-laki, sedangkan sebaran berdasarkan golongan paling banyak Golongan III dengan jenis kelamin perempuan dan berdasarkan pendidikan paling banyak Pendidikan S1 dengan jenis kelamin perempuan.

WE ARE SETBADAN

PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PARIWISATA



bersama bahu membahu bersinergi membangun program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan untuk mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera

2

PERENCANAAN KINERJA



KINERJA ???

"hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama periode tertentu"

Internalisasi **KINERJA** SETBP2SDM

Kadipaten, 12 sd 14 Desember 2023

Sekretariat Badan P2SDM melaksanakan Kegiatan Internalisasi Kinerja untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai terhadap kinerja yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Badan yang tercermin dalam 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta menekankan pentingnya pembagian target kinerja tersebut ke setiap pegawai dalam Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Rencana Strategis 2020-2024

Sasaran Program Kegiatan Dukungan Manajemen

Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan berpelayanan prima



Sasaran Kegiatan

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan P2SDM

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM



2020

Nilai SAKIP BP2SDM : 72 Poin
Level Maturitas SPIP : Level 3
Dokumen Laporan Keuangan yang Tertib dan Akuntabel :
1 Dokumen

2024

Nilai SAKIP BP2SDM : 80 Poin
Level Maturitas SPIP : Level 4
Dokumen Laporan Keuangan yang Tertib dan Akuntabel :
1 Dokumen

2021

Nilai SAKIP BP2SDM : 74 Poin
Level Maturitas SPIP : Level 3
Dokumen Laporan Keuangan yang Tertib dan Akuntabel :
1 Dokumen

2023

Nilai SAKIP BP2SDM : 78 Poin
Level Maturitas SPIP : Level 4
Dokumen Laporan Keuangan yang Tertib dan Akuntabel :
1 Dokumen

2022

Nilai SAKIP BP2SDM : 76 Poin
Level Maturitas SPIP : Level 3
Dokumen Laporan Keuangan yang tertib dan Akuntabel :
1 Dokumen



Rencana Startegis merupakan instrumen dasar kerangka kerja penyelenggaraan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya lingkup Badan P2SDM selama jangka waktu satu periode 5 (lima) tahun secara terarah dan berkesinambungan guna mendukung penyelenggaraan program Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2020-2024, diterbitkan melalui Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020. Adanya perubahan Struktur organisasi dan tata kerja pada Kementerian LHK maka dilakukan penyesuaian terhadap arsitektur kinerja Kementerian LHK sehingga Rencana Strategis tersebut direvisi berdasarkan Keputusan Sekretarias Badan P2SDM Nomor SK.30/SET.11/KKOTL/PEG.0/9/2022.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Badan P2SDM mendukung 1 (satu) Kegiatan Utama yang ada di Badan P2SDM dengan penjabaran selanjutnya pada 3 Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator kinerja kegiatan (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai Sekretariat Badan P2SDM dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya lingkup Badan P2SDM dan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja 2023

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023, ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Badan P2SDM Nomor SK.53/SET/PK/REN.2/12/2022. Renja merupakan instrumen dasar untuk kerangka kerja, perkiraan pembiayaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya dalam mendukung penyelenggaraan Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2023.

Pagu anggaran Renja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023 merupakan pagu indikatif sebagai batas atas belanja dalam penyusunan rancangan/usulan kegiatan sesuai hasil *Trilateral Meeting* antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Badan P2SDM. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya sebesar Rp26.274.064.000.

Pagu Anggaran per Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
Nilai SAKIP Badan P2SDM	78 poin	964.164.000
Level Maturitas SPIP	Level 3	3.792.429.000
Laporan Keuangan yang Tertib dan Akuntabel	1 Dokumen	21.517.471.000
Jumlah		26.274.064.000

Pagu Anggaran per Rincian Output

Rincian Output	Target RO	Pagu (Rp)
Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1 Jabatan	880.000.000
Layanan Umum	1 layanan	14.947.713.000
Layanan Perkantoran	1 Layanan	23.204.002.000
Layanan Sarana Internal	1 Paket	1.039.741.000
Jumlah		26.274.064.000

Pagu Anggaran per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	17.165.945.000
Belanja Barang	8.444.211.000
Belanja Modal	663.906.000
Jumlah	26.274.064.000

Perjanjian Kinerja 2023

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya DIPA Kantor Pusat Badan P2SDM TA 2023, telah dilaksanakan Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023 antara Sekretaris Badan P2SDM dengan Kepala Badan P2SDM pada Bulan Desember 2022. Dengan adanya pergeseran anggaran pada masing-masing unit kerja Eselon II, maka dilakukan revisi Perjanjian Kinerja antara pejabat Eselon II dan Kepala UPT dengan Kepala Badan P2SDM pada tanggal 30 November 2023.



PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Tuti Herawati, S.Hut., M.Si.

Jabatan : Pit. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. A. Palguna Ruteka

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua,

Drs. A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

Pihak Pertama,

Dr. Tuti Herawati, S.Hut., M.Si.
NIP. 19731215 199802 2 003

PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2023 SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

No. (1)	Kegiatan (2)	Sasaran Kegiatan (3)	Indikator Kinerja Kegiatan (4)	Target (5)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	78 Poin
2.			Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Level 3
3.			Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang Tertib dan Akuntabel	1 Dokumen

Klarifikasi rincian output (KRO)/Rincian Output (RO)

Klarifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran (Rp)
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	1 Layanan	3.706.713.000
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	20.183.445.000
EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	1 Layanan	663.906.000
TOTAL			24.554.064.000

Jakarta, 30 November 2023

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Drs. A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

Pit. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Dr. Tuti Herawati, S.Hut., M.Si.
NIP. 19731215 199802 2 003

3

AKUNTABILITAS KINERJA



Capaian
Kinerja

99,24 %

Capaian
Renstra

83,42 %

Efisiensi
Kinerja

0,96

Efektifitas
Kinerja

0,91

Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian IKK

Nilai SAKIP
BP2SDM

76,21 poin

Level
Maturitas SPIP

Level 3

Laporan
Keuangan

1 Dokumen

Laporan Keuangan
Tahun 2022

Reviu atas Dokumen Perencanaan 2023

Rencana Kinerja Sekretariat Badan P2SDM merupakan rencana kinerja anggaran lingkup Kantor Pusat Badan P2SDM dalam mendukung kegiatan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Peningkatan Penyuluhan, dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sebesar Rp 45.415.099.000,00. Sepanjang Tahun Anggaran 2023 terdapat kebijakan *refocusing* pada sumber dana rupiah murni pada belanja pegawai dan belanja barang. Pada akhir tahun anggaran 2023 pagu anggaran Kantor Pusat Badan P2SDM sebesar Rp 48.075.063.000,00 (naik sebesar 5,53 persen dari pagu awal).

Selain itu terdapat 3 kali Penambahan pagu yang berasal dari:

- sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Denda Administratif Bidang Kehutanan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengamanan Hutan Tahun 2023.
- Pergeseran anggaran sumber dana Rupiah Murni antar Satuan Kerja antar Kantor Wilayah DJPb lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan KHDTK dan Penyusunan Target PNBP Tahun 2025.
- Penambahan anggaran belanja pegawai berupa pergeseran anggaran antar Eselon 1 untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai Badan P2SDM TA 2023.

SEMULA	MENJADI	KETERANGAN
45.415.099.000	46.415.099.000	penambahan pagu sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Denda Administratif bidang Kehutanan sebesar Rp1.000.000.000,-
45.415.099.000	45.972.332.000	Realokasi Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp442.767.000,- dan Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.
45.972.332.000	46.047.332.000	penambahan pagu sumber dana RM yang berasal dari Pusat Diklat SDM LHK sebesar Rp75.000.000,-
46.047.332.000	46.177.332.000	penambahan pagu sumber dana RM yang berasal dari BPLHK Bogor sebesar Rp130.000.000,-
46.177.332.000	47.075.063.000	Realokasi Anggaran yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment (AA) Non Belanja Pegawai sebesar Rp308.371.000,- dan penambahan sebesar Rp1.206.102.000,- berupa penyesuaian Belanja Pegawai antar Satker lingkup Badan P2SDM
47.075.063.000	48.075.063.000	penambahan anggaran belanja pegawai berupa pergeseran anggaran antar Eselon 1 untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai Badan P2SDM TA 2023 sebesar Rp1.000.000.000,-

Reviu atas Hasil Evaluasi SAKIP

Pada Tahun 2023 Unit eselon II diwajibkan untuk melaksanakan penilaian mandiri sesuai dengan Keputusan Menteri LHK Nomor 975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023. Berdasarkan surat Kepala Badan P2SDM Nomor S.147/P2SDM/SET.11/REN.2/9/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Hasil Penjaminan Mutu Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2023, Nilai Penjaminan Mutu Sekretariat Badan P2SDM sebesar 83,73 poin. Terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Badan P2SDM untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun selanjutnya. Adapun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Badan P2SDM sebagaimana tabel penjelasan berikut :

No	Rekomendasi	Upaya Tindak Lanjut
1.	Satker agar lebih memahami aturan penyusunan dokumen perencanaan. Mencantumkan Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output yang sesuai	Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output telah dicantumkan pada Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2023
2.	Satuan kerja agar menyusun pohon kinerja/cascading untuk dicantumkan di dalam dokumen perencanaan	Pohon Kinerja/Cascading telah dicantumkan pada Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2023 pada BAB II Perencanaan Kinerja sub bab Rencana Strategis 2020-2024
3.	Melakukan internalisasi terkait Indikator Kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja Satker pada seluruh pegawai kemudian melakukan survei terkait kepedulian pegawai terhadap kinerja Satker	Survei kepedulian pegawai telah dilakukan kepada seluruh pegawai Sekretariat Badan P2SDM pada tanggal 12 Desember 2023 dengan hasil nilai 83,17.
4.	Agar membuat benchmarking dengan satker yang memiliki tugas dan fungsi yang sama	Telah dilakukan benchmarking Nilai SAKIP dengan Eselon II lingkup KLHK yaitu Inspektorat Jenderal dan Ditjen PHL telah dicantumkan pada Laporan Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023
5.	Satker agar membuat pertemuan/diskusi terkait verifikasi evaluasi SAKIP mandiri dan peningkatan kapasitas SDM terkait SAKIP secara periodik. (operator diikutsertakan dalam kegiatan Bimtek SAKIP). Menuangkan tindak lanjut hasil rekomendasi evaluasi SAKIP pada Laporan Kinerja Satker.	Telah dilakukan rapat tindak lanjut hasil Rekomendasi pada tanggal 24 - 25 Juli 2023 di Pusat Diklat SDM LHK Bogor. Ringkasan tindak lanjut terlampir pada Laporan Kinerja Sekretariat Badan P2SDM

Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Pengukuran dilakukan terhadap empat metode yaitu persentase capaian kinerja, progress terhadap pelaksanaan Renstra, efektivitas kinerja dan efisiensi kinerja. Adapun perhitungan menggunakan formula sebagai berikut :

Capaian Kinerja

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Kinerja Tahun 2023

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Progres Renstra

Membandingkan capaian selama periode Renstra dengan target Renstra 2020-2024

$$\text{Capaian Renstra} = \frac{\sum \text{Realisasi 2020 s.d. 2023}}{\text{Target 2020 s.d. 2023}} \times 100\%$$

Efektifitas Kinerja

Membandingkan % kinerja Tahun 2023 dengan %capaian kinerja tahun 2022

$$\text{Efektivitas} = \frac{\% \text{ Fisik Tahun Berjalan}}{\% \text{ Fisik Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Efektivitas ≥ 1 maka efektif
Efektivitas < 1 maka Belum Efektif

Efisiensi Kinerja

Membandingkan antara pelaksanaan anggaran dengan capaian kinerja (fisik) Tahun 2023

$$\text{Efisiensi} = \frac{\% \text{ Keuangan Tahun Berjalan}}{\% \text{ Fisik Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Efisiensi > 1 maka Belum Efisien
Efisiensi ≤ 1 maka Efisien

Hasil Pengukuran Kinerja

Presentase Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata persentase capaian kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023 terhadap perjanjian kinerja revisi sebesar 99,24% yang berarti Sekretariat Badan P2SDM secara umum telah berhasil melampaui target sesuai perjanjian kinerja Tahun 2023. Rincian capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Program disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian		% Capaian Kinerja
		Target PK	Realisasi	
1.	Nilai SAKIP Badan P2SDM	78 poin	76,21 poin	97,71 %
2.	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100 %
3.	Dokumen Laporan Keuangan yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
<i>Rata-rata Persentase Capaian Kinerja</i>				99,24 %

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 1 Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak tercapai yaitu Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Ini disebabkan karena adanya perubahan Peraturan Menteri PAN RB terkait evaluasi implementasi SAKIP pada akhir tahun 2021 yang belum tersosialisasikan di lingkup KLHK. Perubahan tersebut mengubah metode dan komposisi penilaian serta kelengkapan dokumen pendukungnya sehingga terdapat beberapa dokumen yang belum bisa dipenuhi pada saat dilaksanakan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal KLHK di bulan April Tahun 2023.

Hasil Pengukuran Kinerja

Efektivitas Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran Efektivitas kinerja, rata-rata efektivitas kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023 terhadap efektivitas kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023 sebesar 0,91 yang berarti Kinerja Sekretariat Badan P2SDM pada tahun 2023 **Tidak Efektif** . Rincian Efektivitas Kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Kinerja		Efektivitas	Kategori
		2023	2022		
1.	Nilai SAKIP Badan P2SDM	97,71 %	94,41	1,03	Efektif
2.	Level Maturitas SPIP	100,00	133,00	0,75	Tidak Efektif
3.	Dokumen Laporan Keuangan yang tertib dan akuntabel	100,00	100,00	1,00	Efektif
<i>Rata-rata Efektivitas Kinerja</i>				<i>0,91</i>	<i>Tidak Efektif</i>

Indikator Kinerja Kegiatan Level Maturitas SPIP dengan nilai 0,75 (**Tidak efektif**) karena menurunnya capaian Level Maturitas SPIP dari level 4 di tahun 2022 menjadi level 3 di tahun 2023. Ini disebabkan perubahan penilaian dengan terbitnya PermenLHK Nomor 1 Tahun 2023 dimana Penilaian Level Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada eselon II Sekretariat Badan P2SDM dan penilaian sebelumnya di tahun 2022 dilaksanakan pada Eselon I Badan P2SDM. Pada tahun 202.

Hasil Pengukuran Kinerja

Efisiensi Kinerja

Secara umum kinerja Sekretariat Badan P2SDM pada Tahun 2023 sudah efisien, ditunjukkan dari rata-rata nilai efisiensi sebesar 0,92 yang berarti penggunaan anggaran Badan P2SDM telah optimal untuk mencapai target IKP. Tingginya nilai efisiensi pada Tahun 2023 ditunjang oleh tercapainya IKK Level Maturitas SPIP dan Laporan Keuangan yang tertib dan akuntabel. Rincian efisiensi kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase Realisasi Anggaran 2023	Presentase Capaian Kinerja 2023	Efektifitas	Kategori
1.	Nilai SAKIP Badan P2SDM	99,97%	97,71%	1,02	Tidak Efisien
2.	Level Maturitas SPIP	99,95%	100,00%	1,00	Efisien
3.	Laporan Keuangan yang tertib dan akuntabel	94,78%	100,00%	0,95	Efisien
<i>Rata-rata Efisiensi Kinerja</i>				<i>0,96</i>	<i>Efisien</i>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 1 Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak Efisien yaitu Nilai SAKIP Badan P2SDM. Ini disebabkan karena anggaran untuk mendukung kegiatan dukungan manajemen terserap sebesar 99,97% sedangkan nilai SAKIP Badan P2SDM hanya mencapai 76,21 Poin dari target 78 Poin (97,71%). Hal ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan kinerja dalam hal pencapaian SAKIP pada tahun-tahun selanjutnya agar dapat selaras dengan pencapaian kinerja anggaran.

Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian Renstra

Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata progres capaian Renstra Sekretariat Badan P2SDM s.d Tahun 2023 sebesar 83,42 persen. Secara rinci progress capaian Renstra Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel berikut:

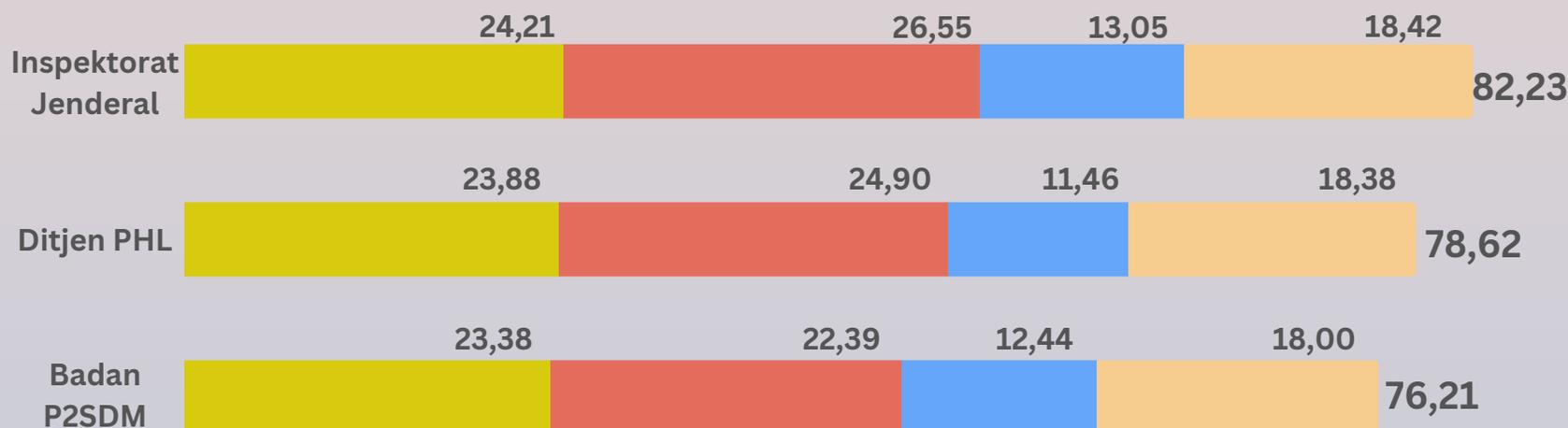
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra 2020-2024	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Progres Renstra
1.	Nilai SAKIP Badan P2SDM	80 poin	85,07 poin	80,82 poin	71,75 poin	76,21 poin	95,26 %
2.	Level Maturitas SPIP	Level 4	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	75,00 %
3.	Dokumen Laporan Keuangan yang tertib dan akuntabel	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80,00 %
<i>Rata-rata progres</i>							83,42 %

Upaya yang akan dilakukan Sekretariat Badan P2SDM pada tahun 2024 untuk mencapai Target Renstra diantaranya :

1. Memenuhi dokumen pendukung penilaian SAKIP pada saat evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal
2. Memenuhi dokumen pendukung Level Maturitas SPIP

Benchmarking Nilai SAKIP lingkup KLHK

Benchmarking kinerja ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dan memberikan gambaran pengelolaan kinerja termasuk Indikator Kinerja pada Instansi lain sehingga dapat memberikan opsi untuk mengadopsi strategi yang lebih efektif untuk peningkatan Nilai SAKIP selanjutnya. Sekretariat Badan P2SDM melaksanakan benchmarking Capaian Nilai SAKIP dengan Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari. Hasil perbandingan Nilai SAKIP sebagai berikut :

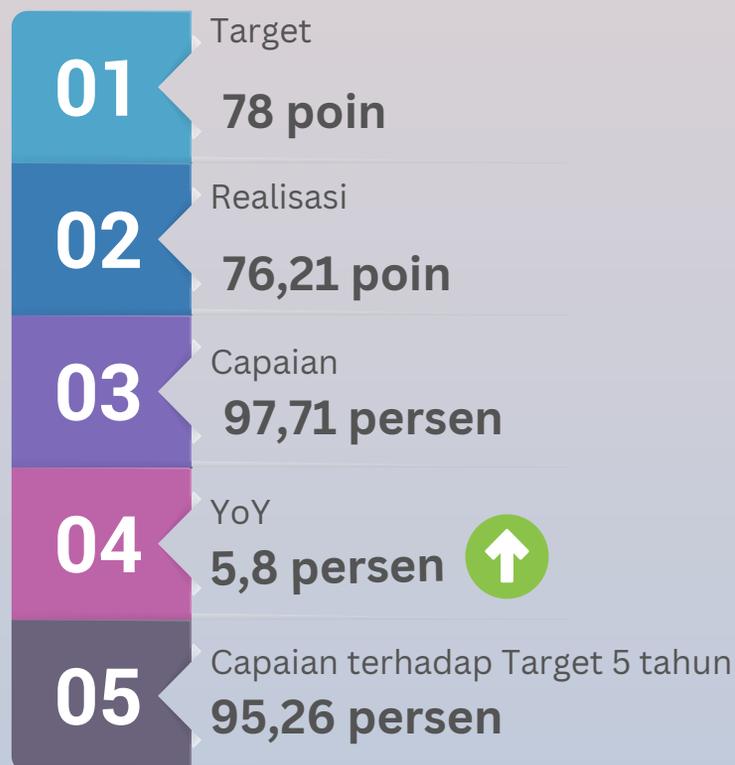


Dari perbandingan tersebut, Badan P2SDM menerapkan strategi amati, tiru dan modifikasi (ATM) terhadap pelaksanaan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dengan melihat dan mempelajari area perubahan yang dilakukan intervensi beserta langkah-langkah perbaikan yang diterapkan. Hal-hal baru yang diperoleh dari hasil *benchmarking* disesuaikan dengan kondisi internal Badan P2SDM dan dituangkan dalam langkah-langkah konkrit dengan pembagian tugas yang jelas untuk meningkatkan nilai SAKIP.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan 1

Nilai SAKIP Badan P2SDM



SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai SIKLUS SAKIP aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

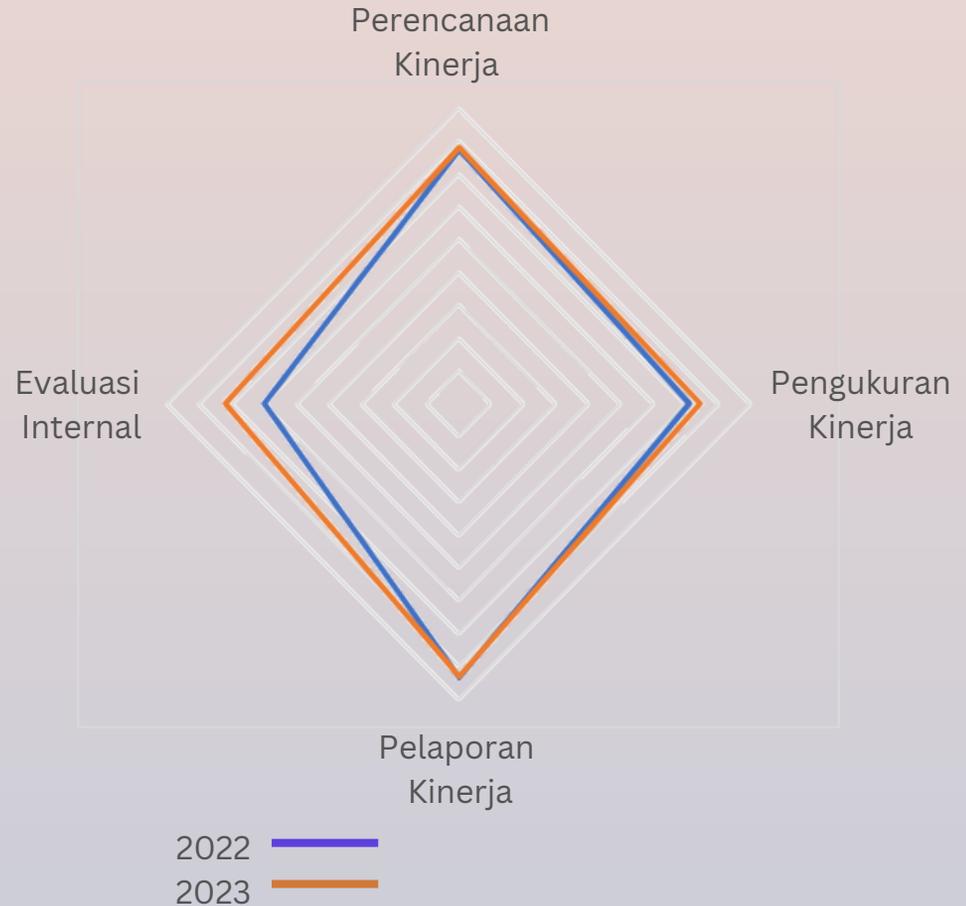
Evaluasi terhadap SAKIP dilaksanakan setiap tahun guna menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas outcome program terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya good governance yang berorientasi hasil. Dalam peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 tahun 2021, komponen yang diukur dalam evaluasi SAKIP meliputi Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (25%).

Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Evaluasi atas penerapan SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jendral KLHK untuk mengukur sejauh mana implementasi SAKIP Badan P2SDM. Evaluasi dilaksanakan pada Bulan April 2023 dengan hasil diperoleh sebesar 76,21 poin dari target 78 poin (97,71%).

Berdasarkan evaluasi pada setiap komponen, pelaporan kinerja merupakan komponen dengan presentase nilai paling tinggi dibandingkan bobotnya yaitu sebesar 82,93% sedangkan komponen perencanaan Kinerja sebesar 77,93%, pengukuran Kinerja sebesar 74,63% dan evaluasi internal memperoleh presentase nilai paling rendah yaitu 72,00%.

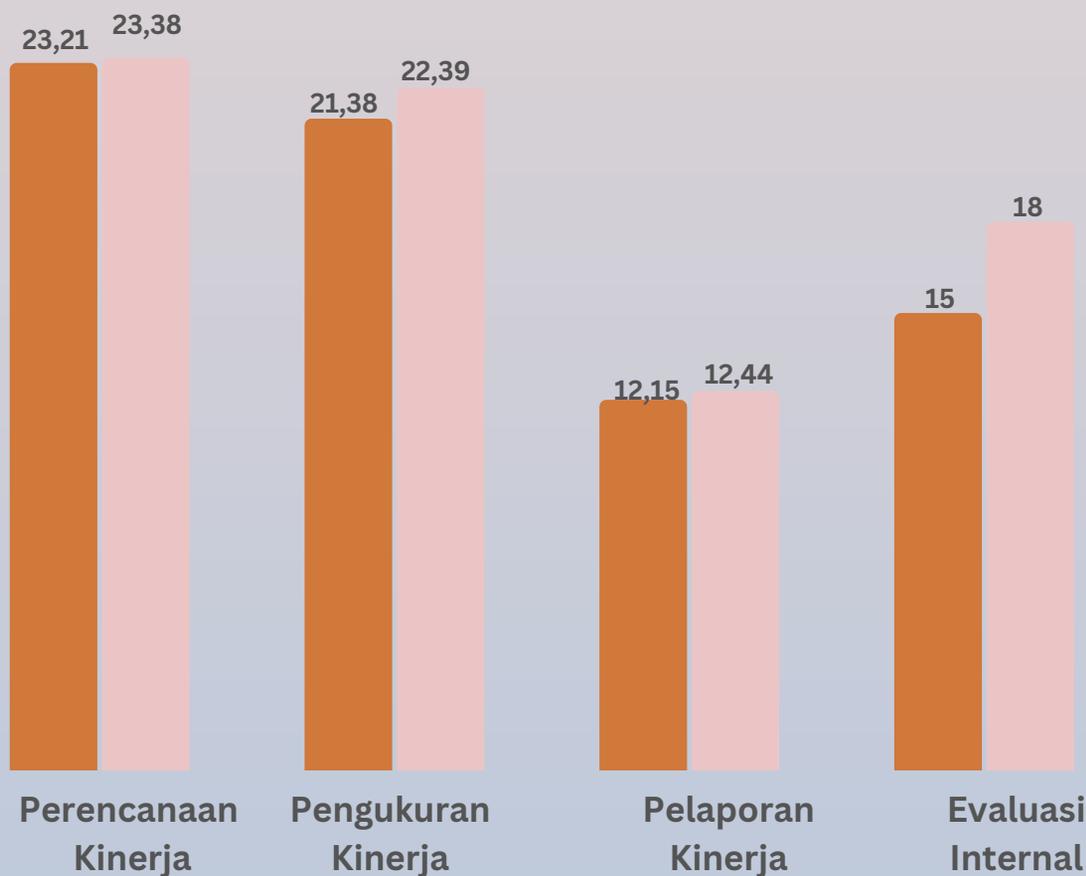
Perkembangan nilai SAKIP Badan P2SDM sejak tahun 2020-2022 mengalami trend penurunan. Namun dibandingkan dengan tahun 2022, capaian pada tahun 2023 meningkat sebesar pada komponen perencanaan sebesar 5,8%.



Komponen	Bobot	Nilai	%
Perencanaan Kinerja	30	23,38	77,93
Pengukuran Kinerja	30	22,39	74,63
Pelaporan Kinerja	15	12,44	82,93
Evaluasi Internal	25	18	72,00
Total	100	76,21	poin

Komponen Nilai SAKIP

Berdasarkan evaluasi pada setiap komponen, komponen perencanaan kinerja memperoleh nilai 23,38 poin dari bobot 30 poin (77,93%), meningkat secara presentase sebesar 0,57%. Komponen pengukuran kinerja memperoleh nilai 22,39 Poin dari target 30 poin (74,63%), meningkat secara presentase sebesar 3,37%, hal ini didukung dengan telah disusunnya pedoman pengukuran kinerja lingkup Badan P2SDM periode Renstra 2020-2024. Komponen pelaporan kinerja memperoleh nilai 12,44 poin dari target 15 poin (82,93%), menurun secara presentase sebesar 0,4%, hal ini disebabkan karena terdapat kelemahan pada pelaporan kinerja Satker Pusat Diklat SDM LHK yang tidak membandingkan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya. Komponen evaluasi internal memperoleh nilai sebesar 18 poin dari target 25 poin (72%), meningkat secara presentase sebesar 12%. Jika merujuk hasil dokumen evaluasi SAKIP, Komponen evaluasi internal menjadi komponen dengan presentase peningkatan capaian tertinggi. Hal ini disebabkan karena telah disusunnya pedoman evaluasi implementasi SAKIP lingkup Badan P2SDM serta telah diterapkannya penilaian SAKIP Mandiri oleh Badan P2SDM serta seluruh Satker lingkup Badan P2SDM menggunakan aplikasi eSAKIP KLHK.



Output

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: “SAKIP” dengan nilai 76,21 Poin

Outcome

Badan P2SDM dapat mempertanggungjawabkan dan menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi ke arah tata kelola pemerintahan yang baik

Faktor Pendukung

1. Komitmen yang kuat dalam menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP dari Inspektorat Jenderal KLHK.
2. Telah terbitnya Keputusan Menteri LHK nomor 975 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi lingkup KLHK yang dapat memberikan pedoman dalam pengelolaan SAKIP.
3. Bimbingan dan asistensi secara intensif terkait peningkatan akuntabilitas seluruh Satker lingkup Badan P2SDM
4. Koordinasi yang baik dengan Biro Perencanaan selaku pengampu akuntabilitas kinerja lingkup Kementerian LHK.
5. Pendampingan dari tim inspektorat jenderal KLHK dalam meningkatkan pengelolaan SAKIP di Badan P2SDM.
6. Penggunaan Aplikasi eSAKIP KLHK oleh seluruh Satker lingkup Badan P2SDM dalam pengumpulan data kinerja serta evaluasi SAKIP Mandiri

Kendala Pelaksanaan

1. Target-target kinerja tahunan yang ada di Badan P2SDM tidak dapat terakomodir sesuai dengan target kinerja pada Renstra karena keterbatasan alokasi anggaran yang diterima.
2. Masih terdapat beberapa Laporan Kinerja Satker lingkup Badan P2SDM yang belum memberikan informasi sesuai dengan standar untuk evaluasi SAKIP.

Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP

Inspektorat Jenderal KLHK melalui Surat Nomor : SP.107/ITJEN/ITWIL.2/RHS/WAS.3/5/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Badan P2SDM menyampaikan rekomendasi yang perlu untuk ditindaklanjuti. Berikut rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Badan P2SDM untuk meningkatkan Nilai SAKIP.

1

Dalam penyusunan IKP agar tidak sering berubah dan berkelanjutan dalam satu periode perencanaan (*sustainable*)

2

Target capaian kinerja IKP dan IKK yang konsisten antara Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja

3

Hasil pencapaian target kinerja yang selaras antara Unit Eselon I dengan Unit Teknis Eselon II

4

Dalam rencana kinerja tahunan atau renja untuk memuat kriteria bahwa target kinerja akan dijadikan dasar untuk memberikan reward dan punishment dan untuk memilih serta memilah pegawai yang berkinerja dan kurang berkinerja

5

Internalisasi kepada satker Pusat terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

6

Memformalkan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja secara internal dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal sebagai Pembina SAKIP lingkup KLHK

Tindaklanjut Rekomendasi Perbaikan

1

Pada penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 Indikator kinerja akan ditargetkan secara konsisten dan penentuan IKP lebih dimatangkan dengan memperhatikan kriteria SMART

2

Badan P2SDM telah menentukan target kinerja sesuai dengan *base line* penganggaran tahun 2023 sehingga tidak meleset jauh dari yang ditargetkan

3

Badan P2SDM telah memastikan capaian-capaian yang diinput pada LKj Satker sesuai dengan kesepakatan hasil rapat penyusunan LKj Badan P2SDM

4

Pada Renja Badan P2SDM Tahun 2023 telah memasukan kriteria Satker berkinerja dan kurang berkinerja

5

Badan P2SDM telah membuat Surat Nomor S.918/SET.11/PEHKT/REN.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Standar Laporan Kinerja Satker lingkup Badan P2SDM

6

Pedoman Teknis evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal telah diformalkan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal KLHK sebagai Pembina SAKIP lingkup KLHK

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan 2

Level Maturitas SPIP



Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern di sebuah instansi.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP didasarkan pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 7 April 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Objek Penilaian Maturitas SPIP

Penetapan Tujuan

Bobot : 40 %
Skor : 2

Komponen ini menilai mengenai kualitas perencanaan sebuah organisasi dengan melihat sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran startegis organisasi.

Pencapaian Tujuan

Bobot : 30 %
Skor : 1,5

Komponen ini menilai struktur dan proses dari unsur SPIP yang tercermin dari 5 unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Struktur dan Proses

Bobot : 30 %
Skor : 1,5

Komponen ini menilai capaian dari 4 tujuan penyelenggaraan SPIP organisasi yang meliputi **efektivitas dan efisiensi**, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil Level Maturitas SPIP Tahun 2023

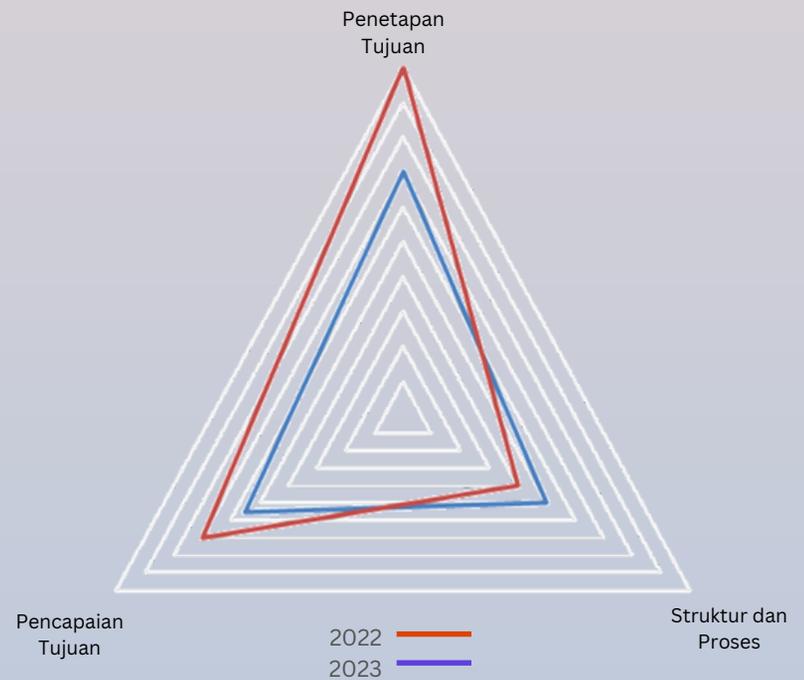
Level Maturitas SPIP Sekretariat Badan P2SDM diperoleh dari hasil penjaminan kualitas penilaian mandiri (PMM) SPIP Badan P2SDM yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK. Dari ekspos hasil penjaminan kualitas terhadap Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Eselon I Lingkup Kementerian LHK, Badan P2SDM memperoleh nilai sebesar 3,5 yang menunjukkan bahwa tingkat Maturitas SPIP Badan P2SDM sudah dalam kategori terdefinisi (Level 3).

Hasil ini telah mencapai target yang ditetapkan (level 3) sehingga capaiannya sebesar 100 persen. Level 4 ini menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Pada Tahun 2022 Level Maturitas Badan P2SDM mencapai Level 4 (terkelola dan terukur) sehingga jika dibandingkan tahun 2023 Level Maturitas SPIP mengalami penurunan sebesar 33,33 persen. Perkembangan Level Maturitas SPIP sejak tahun 2020 hingga 2023 mengalami tren penurunan. Komponen Penetapan Tujuan dan Pencapaian Tujuan mengalami penurunan dan Komponen Struktur dan Proses mengalami Kenaikan.



Komponen	Bobot	Nilai
Penetapan Tujuan	40%	1,4
Struktur dan Proses	30%	1,0
Pencapaian Tujuan	30%	1,1
Total	100%	3,5



Output

Level Maturitas Sekretariat badan berada di Level 3 **“Terdefinisi”**

Outcome

Dengan pencapaian nilai maturitas di level 3 menunjukkan bahwa Sekretariat Badan P2SDM telah melakukan pengendalian internal dan mendokumentasikan kegiatan pengendalian dengan baik, namun kegiatan evaluasi terhadap pengendalian internal masih belum terdokumentasikan dengan baik.

Faktor Pendukung

1. Komitmen Pimpinan terhadap SPIP
2. Koordinasi yang baik dengan pembina pengelolaan SPIP lingkup KLHK
3. Dokumen bukti dukung SPIP yang sebagian besar telah terpenuhi

Kendala Pelaksanaan

1. Belum seluruh pegawai memahami mengenai pengendalian internal
2. Masih terdapat beberapa bukti dukung yang perlu diupdate kembali
3. Belum terdokumentasinya kegiatan evaluasi terhadap pengendalian internal dengan baik

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan 3

Laporan Keuangan Badan P2SDM yang tertib dan akuntabel



Laporan Keuangan merupakan suatu siklus tahunan yang dimulai pertengahan semester dimana untuk tahun berjalan seluruh dokumen administrasi mulai dilakukan audit, sehingga pada akhir tahun anggaran, telah tersedia Laporan Keuangan (unaudited) untuk Semester I tahun anggaran berjalan tersebut. Siklus ini berimplikasi pada periode pemantauan kinerja untuk indikator opini BPK atas Laporan Keuangan ini.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian LHK dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan kualitas. Setelah mendapatkan opini WDP pada dua tahun pertama pasca penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Laporan Keuangan tahun 2020 hingga 2022 (saat ini) berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Capaian Laporan Keuangan Tahun 2023



Pada triwulan I antara bulan Januari s.d. Maret hal terpenting yang dilaksanakan adalah penyepakatan angka asersi final antara tiga pihak yaitu KLHK, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan BPK-RI).

Pada triwulan II antara bulan April hingga Juni dilakukan sinkronisasi Laporan Keuangan (audited) dengan BPK-RI. Pada periode ini juga dilakukan penyampaian Laporan Keuangan Audited ke Kementerian Keuangan dan penyusunan renaksi tindak lanjut konsep LHP BPK-RI. Ini merupakan siklus puncak dari penilaian Laporan Keuangan Kementerian /Lembaga.

Pada triwulan III opini atas Laporan Keuangan tahun 2022 disampaikan BPK-RI. Pada periode ini Laporan Keuangan semester II juga disampaikan kepada BPK-RI.

Triwulan IV merupakan periode penyusunan laporan keuangan untuk triwulan IV sekaligus merupakan periode penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan tahun sebelumnya.

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2022

1

LKKL Tahun 2022 (Unaudited) dihasilkan melalui data Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang 1 terbuku sampai dengan 31 Desember 2022

2

Memastikan seluruh satker lingkup Badan P2SDM telah menyelesaikan rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dengan KPPN untuk periode Desember 2022 sampai dengan terbitnya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

3

Memastikan seluruh satker (termasuk subsatker) telah melakukan tutup buku Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap, serta tutup permanen Modul GLP sampai dengan periode Desember 2022 (Periode 12 dan 13)

4

Memperhatikan batas waktu penyampaian LK Tahun 2022 (Unaudited) untuk setiap jenjang Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan 12

5

Memastikan lembar muka/face setiap komponen LKKL Tahun 2022 (Unaudited) telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran

6

Memastikan LK Tahun 2022 (Unaudited) telah disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari Pengguna Anggaran serta Pernyataan Telah Direviu

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan P2SDM

Laporan Realisasi Keuangan

Realisasi Pendapatan Negara hingga tanggal 31 Desember 2022 yang berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.169.750.287,00 atau mencapai 212,68 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp550.000.000,00. Sedangkan realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp 266.139.477.026,00 atau mencapai 99,94 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 267.440.323.000,00

Laporan Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Pada 31 Desember 2022. Nilai Aset dicatat dan disajikan sebesar Rp2.761.611.488.198,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp387.935.763,00 dan Rp2.761.223.552.435,00.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defiit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(266.392.388.407,00).

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp2.761.223.552.435,00.

Output

Menyajikan informasi komponen utama data keuangan (Laporan Realisasi, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas) dalam bentuk Laporan Keuangan

Outcome

Badan P2SDM dapat mempertanggungjawabkan dan menyajikan Laporan keuangan yang tertib dan akuntabel

Faktor Pendukung

1. Penerapan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan
2. Digitalisasi dokumen sumber (SI-AKLAP)
3. Optimalisasi peranan APIP

Kendala Pelaksanaan

1. Penuntasan proses migrasi Saldo Awal SAKTI
2. Penyelesaian pendetaialan persediaan/ Aset Tetap
3. TDK Rekonsiliasi SPAN-SAKTI
4. Ketidaksesuaian akun dengan kode BMN/ persediaan
5. Pagu minus dan saldo tidak normal

Rekomendasi dan Tindaklanjut Hasil Rekonsiliasi Internal

Pada tanggal 22-24 Januari 2023 dilakukan rekonsiliasi internal antara Satker lingkup Badan P2SDM dengan Eselon I Badan P2SDM, dari hasil rekonsiliasi yang didampingi oleh Biro Keuangan KLHK dan Ditjen Perbendaharaan terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebagai berikut :

Rekomendasi

Selisih rekon internal pada LK 2022 Audited agar diselesaikan di SAKTI Tahun 2023

Tindaklanjut

- Eselon I Badan telah melakukan identifikasi atas selisih rekon internal TAYL
- Penyelesaian selisih dilakukan secara terpusat oleh Kemenkeu (d.h.i. DJPb)
- Dilakukan penambahan validasi di SAKTI untuk mencegah selisih rekon internal

Realisasi Anggaran Tahun 2023

Tahun 2023 Realisasi Sekretariat Badan P2SDM yang merupakan salah satu Sub Satker dari Kantor Pusat Badan P2SDM sebesar Rp25.146.668.402 atau sebesar 95,71 persen dari pagu anggaran Rp.26.274.064.000. Rincian realisasi anggaran sebagai berikut :

Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Nilai SAKIP Badan P2SDM	964.164.000	963.891.942	99,97
Level Maturitas SPIP	3.792.429.000	3.789.585.413	99,93
Laporan Keuangan yang Tertib dan Akuntabel	21.517.471.000	20.393.191.047	94,78
Jumlah	26.274.064.000	25.146.668.408	95,71

Pagu Anggaran per Rincian Output

Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	880.000.000	877.976.050	99,77
Layanan Umum	14.947.713.000	3.705.474.385	99,97
Layanan Perkantoran	23.204.002.000	19.899.313.967	94,65
Layanan Sarana Internal	1.039.741.000	663.904.000	100,00
Jumlah	26.274.064.000	25.146.668.402	95,71

Pagu Anggaran per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	17.165.945.000	16.042.876.890	93,46
Belanja Barang	8.444.211.000	8.439.887.836	99,95
Belanja Modal	663.906.000	663.904.000	100,00
Jumlah	26.274.064.000	25.146.668.402	95,71



Nilai Kinerja Anggaran KANTOR PUSAT BP2SDM

EKA_{50%}

87,36

NKA

90,85

IKPA_{50%}

94,34

Data berdasarkan OM SPAN 10 Januari 2024 pukul 09.00 wib

4

PENUTUP



1. Laporan Kinerja Tahun 2022 menjadi feedback dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023 sehingga capaian di Tahun 2023 secara umum dapat meningkatkan beberapa capaian di Sekretariat Badan P2SDM seperti IKK 2 Level Maturitas SPIP , IKK 3 Laporan Keuangan BP2SDM yang tertib dan Akuntabel sudah sesuai dengan yang ditargetkan, serta capaian realisasi anggaran Sekretariat Badan P2SDM yang menurun sebesar 4,20% dari tahun 2022. Meskipun masih ada satu capaian IKK yaitu nilai SAKIP yang hanya mencapai 94,41% dari target yang sudah dicanangkan di Tahun 2022 karena adanya adaptasi terhadap peraturan penilaian yang baru.
2. Selanjutnya, agar Laporan kinerja ini dapat bermanfaat di tahun 2024, maka Sekretariat Badan P2SDM akan mengambillangkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Berusaha mempertahankan dan meningkatkan capaiannya terutama capaian IKK 1 Nilai SAKIP Badan P2SDM dengan meningkatkan pemahaman mengenai tata cara penilaian SAKIP serta kelengkapan dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan peraturan yang baru melalui bimtek dan asistensi ke satker lingkup Badan P2SDM.
 - b. Sekretariat Badan akan lebih intensif dalam mengawal revisi Halaman III DIPA untuk keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan dan mendukung peningkatan nilai IKPA